



LAPORAN SKM TW II 2026

PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN



REKAM CATATAN SIPIL

PROVINSI JAWA BARAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code
atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Manfaat	2
1.3 Metode Pengumpulan Data	2
1.4 Waktu Pelaksanaan SKM	5
1.5 Penentuan Jumlah Responden.....	5
BAB II	6
ANALISIS DATA SKM	6
2.1 Analisis Responden	6
2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Berdasarkan Jenis Layanan	7
2.3 Indeks Kepuasan Masyarakat Berdasarkan Unit Kerja.....	8
2.4 Jumlah Keluhan Berdasarkan Unsur Layanan	8
2.5 Analisis Masalah dan Rencana Tindak Lanjut.....	10
2.6 Tren Nilai SKM.....	10
BAB III	11
HASIL TINDAK LANJUT SKM PERIODE SEBELUMNYA	11
BAB IV.....	12
KESIMPULAN.....	12
LAMPIRAN	14
1. Dokumentasi Pelaksanaan SKM	14



1C9DCC6E61

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code
atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat tersebut diharapkan dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih tepat sasaran. Untuk menjalankan amanat kedua kebijakan tersebut, maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.

Untuk mendorong terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat secara rutin menyelenggarakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan publik melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mendapatkan *feedback*/umpan balik atas kinerja dan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Hasil survei ini dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan kinerja dan kualitas pelayanan secara berkesinambungan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat untuk mengukur kualitas pelayanan. Hasil survei ini akan digunakan sebagai acuan perbaikan pelayanan publik yang dituangkan dalam rencana tindak lanjut sehingga dapat tercapai pelayanan prima yang sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat sebagai pengguna layanan. Dalam laporan ini juga disampaikan realisasi tindak lanjut dari pelaksanaan survei pada periode sebelumnya, sebagai bentuk komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan.



1.2 Tujuan dan Manfaat

Pelaksanaan SKM bertujuan untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan menilai kinerja Organisasi Penyelenggaraan Pelayanan (OPP). Adapun manfaat yang diperoleh melalui SKM, antara lain:

1. Mengidentifikasi kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan;
2. Mengetahui kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Mengetahui indeks kepuasan masyarakat pada lingkup organisasi penyelenggara pelayanan maupun instansi pemerintah;
4. Meningkatkan persaingan positif antar organisasi penyelenggara pelayanan;
5. Menjadi dasar penetapan kebijakan maupun perbaikan kualitas pelayanan; dan
6. Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai kinerja organisasi penyelenggara pelayanan.

1.3 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM dilakukan secara mandiri oleh masyarakat penerima layanan di masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik melalui media survei online yaitu aplikasi SKM Terintegrasi Jawa Barat. Setelah menyelesaikan seluruh proses layanan dan menerima produk akhir atau jasa pelayanan publik, pengguna layanan dapat melakukan pindai QR code yang tersedia di ruang layanan atau mengakses tautan SKM yang diberikan oleh penyelenggara. Pengumpulan data dilakukan secara *real time* dan terhimpun secara otomatis di dalam aplikasi SKM terintegrasi.

Kuesioner terdiri atas 9 unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Sembilan unsur dalam kuesioner SKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat yaitu :

1. **Persyaratan:** Persyaratan adalah ketentuan teknis maupun administratif yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis layanan dan dipublikasikan melalui berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat.



2. **Sistem, mekanisme dan prosedur:** Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan, serta pemantauan terhadap potensi kecurangan dalam pelaksanaannya.
3. **Waktu penyelesaian:** Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif:** Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Unsur ini juga mencakup pengawasan terhadap praktik percaloan serta potensi pungutan liar dalam pelaksanaan pelayanan.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan:** Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi pelaksana:** Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana:** Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan:** Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana:** Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan pada penyelenggaraan pelayanan, baik secara luring, daring maupun hybrid.

Skala Likert digunakan dalam survei ini untuk memberikan ukuran skala ordinal dari persepsi masyarakat terhadap layanan yang diterima. Skala adalah tingkatan ukuran data kuantitatif yang sering digunakan dalam penelitian survei untuk memperoleh intensitas, arah, tingkat, atau potensi dari sebuah konstruk variabel. Responden diberikan satu pertanyaan yang menggambarkan persepsinya terhadap kualitas layanan yang diberikan berdasarkan tingkat kepuasan, dengan menggunakan rating dalam skala 1-5, sebagai berikut:



1C9DCC6E61

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code
atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Rating	Deskripsi
1	Sangat Tidak Puas
2	Tidak Puas
3	Biasa Saja
4	Puas
5	Sangat Puas

Selanjutnya, analisis statistik deskriptif dilakukan untuk menggambarkan data numerik, yang memungkinkan kita mengkategorikannya berdasarkan jumlah variabel. Langkah ini melibatkan pemrosesan data mentah yang diperoleh ke dalam format yang lebih mudah dipahami, seperti distribusi frekuensi, persentase, representasi grafis, diagram batang, diagram lingkaran, gambar, dll. Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk menyajikan informasi yang diperoleh kepada pembaca dengan cara yang mudah, dapat digunakan, dan dapat dimengerti. Untuk melakukan analisis statistik deskriptif, diperlukan sistem skoring untuk mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam rentang skala interval yang dirumuskan di bawah ini.

$$\text{Rentang Skala Interval : } RS = \frac{m - n}{b} = \frac{5 - 1}{5} = 0.8$$

Dimana:

RS = Rentang Skala

m = nilai tertinggi

n = nilai terendah

b = jumlah skala

Berdasarkan perhitungan ini, ditetapkan bahwa rentang skala antar kategori adalah 0,8. Nilai ini menjadi rujukan dalam penerapan kategori sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Nilai	Kategori
$1.00 < X \leq 1.80$	Sangat Buruk
$1.81 < X \leq 2.60$	Buruk
$2.61 < X \leq 3.40$	Cukup
$3.41 < X \leq 4.20$	Baik
$4.21 < X \leq 5.00$	Sangat Baik



1C9DCC6E61

1.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Pengumpulan data dilakukan secara *real time* dan terhimpun secara otomatis di dalam aplikasi SKM terintegrasi. Indeks Kepuasan Masyarakat secara aktual dapat diakses di dashboard akun masing-masing penyelenggara.

1.5 Penentuan Jumlah Responden

Populasi dalam pelaksanaan survei adalah masyarakat yang menerima pelayanan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selanjutnya, metode yang digunakan adalah teknik sensus dimana seluruh pengguna layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dijadikan sebagai sumber informasi/responden.



BAB II

ANALISIS DATA SKM

2.1 Analisis Responden

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu sebanyak 50 orang. Jumlah responden kemudian diolah berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan dengan rincian sebagai berikut:

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	Jenis Kelamin	Laki-Laki	32	64%
		Perempuan	18	36%
2	Pendidikan	SD	2	4%
		SMP	3	6%
		SMA	30	60%
		D1/D2/D3	1	2%
		S1	9	18%
		S2	5	10%
3	Pekerjaan	PNS/TNI/POLRI	9	18%
		Pegawai Swasta	7	14%
		Wiraswasta	14	28%
		Pelajar	3	6%
		Lainnya	17	34%



2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Berdasarkan Jenis Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data terhadap 50 responden, diperoleh data capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan jenis layanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2025. Daftar layanan ditampilkan secara berurutan dimulai dari layanan dengan jumlah responden terbanyak hingga yang paling sedikit untuk memberikan gambaran prioritas persepsi masyarakat terhadap jenis layanan yang paling banyak dimanfaatkan, serta dilengkapi dengan distribusi jumlah rating penilaian responden terhadap masing-masing jenis layanan, seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Jenis Layanan	Jumlah Responden	★ 1	★ 2	★ 3	★ 4	★ 5	IKM
1.	AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL	36	1	0	0	1	34	97.22
2.	SISTEM INFORMASI DATA KEPENDUDUKAN (SIDATUK)	11	1	0	0	1	9	90.91
3.	DATA DAN INFORMASI	3	0	0	0	0	3	100.00
4.	PERMOHONAN KONSULTASI	0	0	0	0	0	0	0
5.	PERMOHONAN MAGANG/PKL	0	0	0	0	0	0	0
6.	PERMOHONAN NARASUMBER/PEMBICARA/KEYNOTE SPEAKERS	0	0	0	0	0	0	0
IKM Unit Layanan								96
Mutu Layanan								A



1C9DCC6E61

2.3 Indeks Kepuasan Masyarakat Berdasarkan Unit Kerja

Berdasarkan hasil pengolahan data SKM tahun 2025, capaian Indeks Kepuasan Masyarakat disajikan menurut masing-masing unit layanan/UPTD/Cabang Dinas yang berada di bawah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Setiap unit diperbandingkan berdasarkan jumlah responden yang memberikan penilaian, mulai dari bintang 1 (*sangat tidak puas*) hingga bintang 5 (*sangat puas*). Variasi jumlah responden pada setiap unit memberikan gambaran mengenai tingkat intensitas pemanfaatan layanan, sekaligus menjadi indikator awal mengenai unit layanan mana yang paling banyak memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

No	Unit layanan/UPTD/Cabang Dinas	Jumlah Responden	★ 1	★ 2	★ 3	★ 4	★ 5	IKM
1.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Induk)	50	2	0	0	2	46	96.00

Perbedaan nilai IKM antar unit bukan dimaksudkan sebagai perbandingan kompetitif, melainkan sebagai dasar diagnostik untuk melihat area mana yang telah berjalan baik dan area mana yang masih memerlukan peningkatan. Penyajian IKM berdasarkan unit layanan ini berfungsi sebagai alat bantu manajemen untuk melakukan evaluasi berbasis data, memastikan tindak lanjut perbaikan layanan dilaksanakan secara tepat sasaran pada unit yang membutuhkan peningkatan, sekaligus mempertahankan praktik baik pada unit dengan kinerja pelayanan tinggi.

2.4 Jumlah Keluhan Berdasarkan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil survei, keluhan yang disampaikan responden dianalisis menggunakan mekanisme single rating untuk menggambarkan persepsi kepuasan secara umum. Jumlah keluhan dicatat hanya bersumber dari responden yang memberikan



rating kepuasan ≤ 3 dan mengisi *multiple checklist* untuk mengidentifikasi aspek pelayanan mana saja yang masih dirasakan kurang oleh pengguna, sehingga data keluhan benar-benar merepresentasikan pengalaman pengguna yang masih belum puas terhadap layanan. Hasil pengolahan menunjukkan bahwa jumlah dan sebaran aspek keluhan bervariasi antar unit kerja, mencerminkan adanya perbedaan karakteristik layanan dan titik kritis pada masing-masing unit.

Distribusi keluhan per unit kerja menjadi dasar penting dalam identifikasi peluang perbaikan layanan. Unit kerja dengan tingkat keluhan lebih tinggi pada aspek tertentu akan menjadi prioritas untuk intervensi peningkatan mutu, baik melalui penyempurnaan SOP, peningkatan kapasitas SDM, maupun penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Dengan demikian, hasil survei tidak hanya menggambarkan persepsi kepuasan secara agregat, tetapi juga memberikan insight mengenai aspek layanan mana yang memerlukan perhatian untuk meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan.

No	Unit layanan/UPTD/Cabang Dinas	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Induk)	1 (50%)	2 (100%)	2 (100%)	0 (0 %)	2 (100%)	2 (100%)	2 (100%)	2 (100%)	1 (50%)

Keterangan:

U1 : Persyaratan

U2 : Prosedur

U3 : Waktu

U4 : Biaya

U5 : Produk Layanan

U6 : Kompetensi Pelaksana

U7 : Perilaku

U8 : Penanganan Pengaduan

U9 : Sarana dan Prasarana



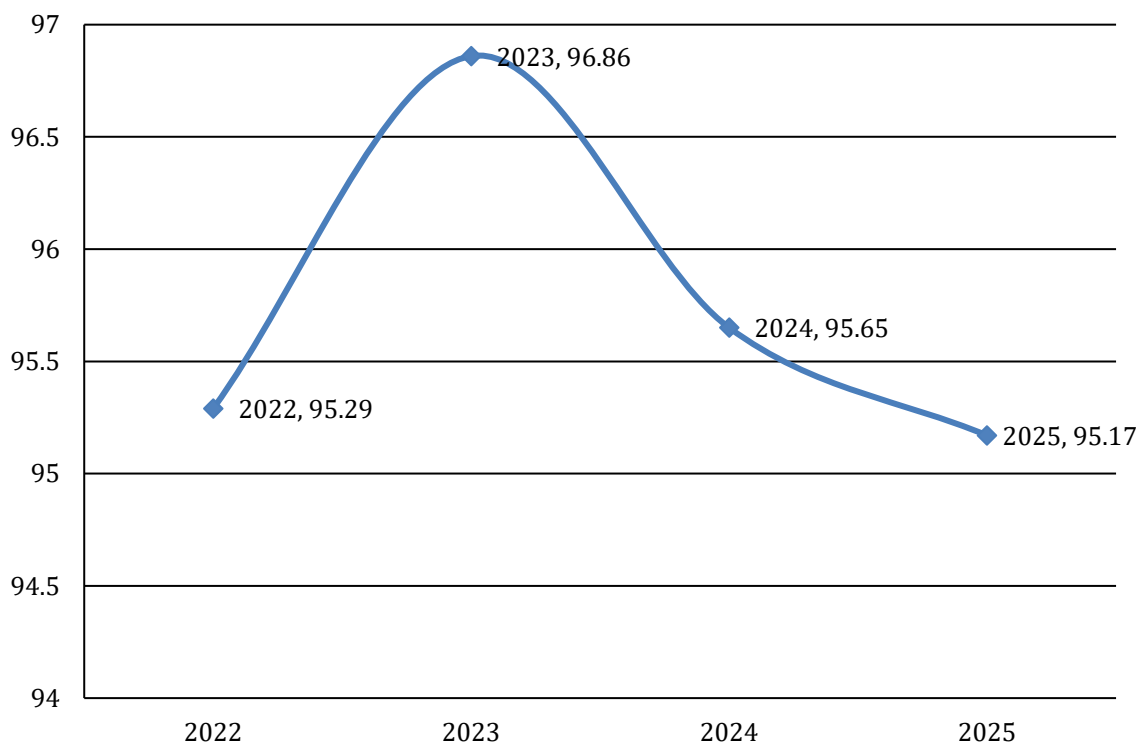
1C9DCC6E61

2.5 Analisis Masalah dan Rencana Tindak Lanjut

Pelaksanaan SKM di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan secara tersentralisasi di dalam aplikasi SKM Jabar Terintegrasi, oleh karena itu Rencana Tindak Lanjut dari hasil pelaksanaan SKM dimuat dalam Laporan Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Mekanisme ini dilakukan agar OPP tidak hanya berupaya untuk meningkatkan nilai SKM secara angka, tetapi lebih penting lagi, untuk menjawab permasalahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat.

2.6 Tren Nilai SKM

Tren tingkat kepuasan penerima layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dapat dilihat melalui grafik berikut:



Berdasarkan tabel di atas, tren nilai SKM selama kurun waktu 4 tahun terakhir menunjukkan pola yang fluktuatif. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat telah berupaya menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengoptimalkan kinerja pelayanan publik melalui berbagai upaya perbaikan.



1C9DCC6E61

BAB III

HASIL TINDAK LANJUT SKM PERIODE SEBELUMNYA

Pelaksanaan SKM di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan secara tersentralisasi di dalam aplikasi SKM Jabar Terintegrasi, oleh karena itu Laporan Rencana dan Hasil/Realisasi Tindak Lanjut dari hasil pelaksanaan SKM dimuat dalam Laporan Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Mekanisme ini dilakukan agar OPP tidak hanya berupaya untuk meningkatkan nilai SKM secara angka, tetapi lebih penting lagi, untuk menjawab permasalahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat.



1C9DCC6E61

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code
atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB IV

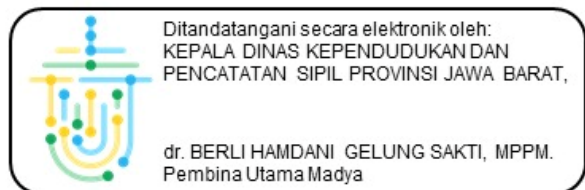
KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) periode 01 April s.d 30 Juni 2026, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebanyak 50 responden mengisi SKM pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat periode 01 April s.d 30 Juni tahun 2026. AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL menjadi jenis layanan dengan responden terbanyak yaitu 36 orang.
2. Pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat secara umum mencerminkan tingkat kualitas dengan predikat **A** dengan nilai **96**

Bandung, 30 Juni 2026

**Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil**



1C9DCC6E61

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code
atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

LAMPIRAN

1. Dokumentasi Pelaksanaan SKM

Usia	Pekerjaan	Pendidikan	Jenis Kelamin	Layanan
21-30	LAINNYA	SD	L	Aktivasi Identitas Kependudukan Digital
21-30	LAINNYA	SMA	P	Aktivasi Identitas Kependudukan Digital
20 kebawah	PELAJAR/MAHASISWA	SMA	L	Aktivasi Identitas Kependudukan Digital
51-60	PEGAWAI SWASTA	S1	L	Sistem Informasi Data Kependudukan (SIDATUK)
31-40	WIRASWASTA	SMP	L	Aktivasi Identitas Kependudukan Digital
41-50	WIRASWASTA	SMA	L	Aktivasi Identitas Kependudukan Digital
21-30	WIRASWASTA	SMA	L	Aktivasi Identitas Kependudukan Digital
21-30	LAINNYA	SMA	L	Aktivasi Identitas Kependudukan Digital
21-30	WIRASWASTA	SMA	L	Aktivasi Identitas Kependudukan Digital



14

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code
atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

41-50	PNS/TNI/POLRI	S2 keatas	P	Data dan Informasi
31-40	PNS/TNI/POLRI	S1	L	Sistem Informasi Data Kependudukan (SIDATUK)
51-60	PNS/TNI/POLRI	S2 keatas	P	Data dan Informasi
21-30	LAINNYA	SMA	L	Aktivasi Identitas Kependudukan Digital
21-30	PEGAWAI SWASTA	SMP	L	Aktivasi Identitas Kependudukan Digital
21-30	PEGAWAI SWASTA	SMA	L	Sistem Informasi Data Kependudukan (SIDATUK)
51-60	PNS/TNI/POLRI	S2 keatas	P	Sistem Informasi Data Kependudukan (SIDATUK)
51-60	LAINNYA	S2 keatas	L	Sistem Informasi Data Kependudukan (SIDATUK)
31-40	LAINNYA	SMA	L	Aktivasi Identitas Kependudukan Digital
61 keatas	LAINNYA	S2 keatas	P	Aktivasi Identitas Kependudukan Digital
51-60	PNS/TNI/POLRI	S1	P	Aktivasi Identitas Kependudukan Digital



21-30	WIRASWASTA	SMA	L	Sistem Informasi Data Kependudukan (SIDATUK)
31-40	LAINNYA	SMA	L	Sistem Informasi Data Kependudukan (SIDATUK)
41-50	LAINNYA	SMA	P	Sistem Informasi Data Kependudukan (SIDATUK)
21-30	LAINNYA	SMA	L	Aktivasi Identitas Kependudukan Digital
31-40	WIRASWASTA	SD	P	Sistem Informasi Data Kependudukan (SIDATUK)
21-30	PEGAWAI SWASTA	SMA	P	Aktivasi Identitas Kependudukan Digital
20 kebawah	PEGAWAI SWASTA	SMA	P	Aktivasi Identitas Kependudukan Digital
31-40	WIRASWASTA	SMA	P	Aktivasi Identitas Kependudukan Digital
21-30	LAINNYA	SMA	L	Aktivasi Identitas Kependudukan Digital
41-50	LAINNYA	S1	P	Aktivasi Identitas Kependudukan Digital
31-40	LAINNYA	SMA	P	Aktivasi Identitas



				Kependudukan Digital
61 keatas	LAINNYA	S1	L	Aktivasi Identitas Kependudukan Digital
51-60	WIRASWASTA	S1	P	Aktivasi Identitas Kependudukan Digital
21-30	PNS/TNI/POLRI	SMA	L	Aktivasi Identitas Kependudukan Digital
21-30	PNS/TNI/POLRI	SMA	L	Aktivasi Identitas Kependudukan Digital
21-30	PEGAWAI SWASTA	SMA	P	Aktivasi Identitas Kependudukan Digital
31-40	PEGAWAI SWASTA	SMA	L	Sistem Informasi Data Kependudukan (SIDATUK)
21-30	WIRASWASTA	SMA	L	Aktivasi Identitas Kependudukan Digital
21-30	WIRASWASTA	SMA	L	Aktivasi Identitas Kependudukan Digital
21-30	WIRASWASTA	SMP	L	Aktivasi Identitas Kependudukan Digital
20 kebawah	LAINNYA	SMA	P	Aktivasi Identitas



				Kependudukan Digital
51-60	PNS/TNI/POLRI	S1	P	Aktivasi Identitas Kependudukan Digital
21-30	PELAJAR/MAHASISWA	S1	L	Aktivasi Identitas Kependudukan Digital
21-30	WIRASWASTA	SMA	L	Aktivasi Identitas Kependudukan Digital
21-30	PNS/TNI/POLRI	S1	L	Aktivasi Identitas Kependudukan Digital
21-30	WIRASWASTA	SMA	L	Aktivasi Identitas Kependudukan Digital
31-40	WIRASWASTA	SMA	L	Data dan Informasi
41-50	LAINNYA	SMA	L	Sistem Informasi Data Kependudukan (SIDATUK)
21-30	LAINNYA	D1/D2/D3	P	Aktivasi Identitas Kependudukan Digital
20 kebawah	PELAJAR/MAHASISWA	SMA	L	Aktivasi Identitas Kependudukan Digital

